

**PENGARUH TRANSPARANSI DALAM SISTEM  
PENGENDALIAN INTERDANSI SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA GUNA  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Demak)

**Skripsi  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1**



**Disusun Oleh :  
Windarti Widyaningrum  
31402100113**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2025**

**PENGARUH TRANSPARANSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Disusun serta diajukan dalam memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana S1  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

**Disusun Oleh :**

**UNISSULA**  
جامعته سلطان ابيونج الاسلاميه  
**Windarti Widyaningrum**

**Nim : 31401900080**

**Universitas Islam Sultan Agung**

**Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi**

**Semarang**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Windarti Widyaningrum  
NIM : 31402100113  
Judul Proposal : **PENGARUH TRANSPARANSI DALAM SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM  
INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
Pembimbing : Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA.

Semarang, 02 Juli 2025

Mengetahui,

Menyetujui,

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi**

**Pembimbing**

**Fakultas Ekonomi**



Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD Ak.  
CA, IFP, AWP  
NIDN : 0611088001

Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA, CRP  
NIDN : 0610107001

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH TRANSPARANSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN**  
**INTERN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP**  
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA GUNA**  
**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**Disusun oleh:**

**Windarti Widyaningrum**

**Nim : 31402100113**

Telah dipresentasikan di depan peguji

Pada tanggal 9 Desember 2024

**Susunan Dewan Peguji**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE, S.Si.,**  
**M.Si., Akt., CA., CSRA., CSRS**  
**NIDN : 0612026802**

**Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIDN : 068068202**

**Pembimbing**

**Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA, CRP**  
**NIDN : 0610107001**



## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Windarti Widyaningrum  
NIM : 31402100113  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pra skripsi yang berjudul :

“PENGARUH TRANSPARANSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA GUNA  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme*. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 05 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Windarti Widyaningrum

## DAFTAR PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windarti Widyaningrum

---

Nim 31402100113

---

Program Studi : S1 Akuntansi

---

Fakultas : Ekonomi

Dengan penyerahan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi / Tesis /Disertasi \* dengan judul : **—Pengaruh Transparansi dalam Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa guna Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Demak)**” dan menyatakan setuju menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak bebas Royalti Non-ekslusi untuk disimpan, dialihkan media, dikelola dan publikasi untuk kepentingan akademis sesuai kode akademik penelitian dengan tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.



Semarang, 05 Juli 2025

Yang Menyatakan

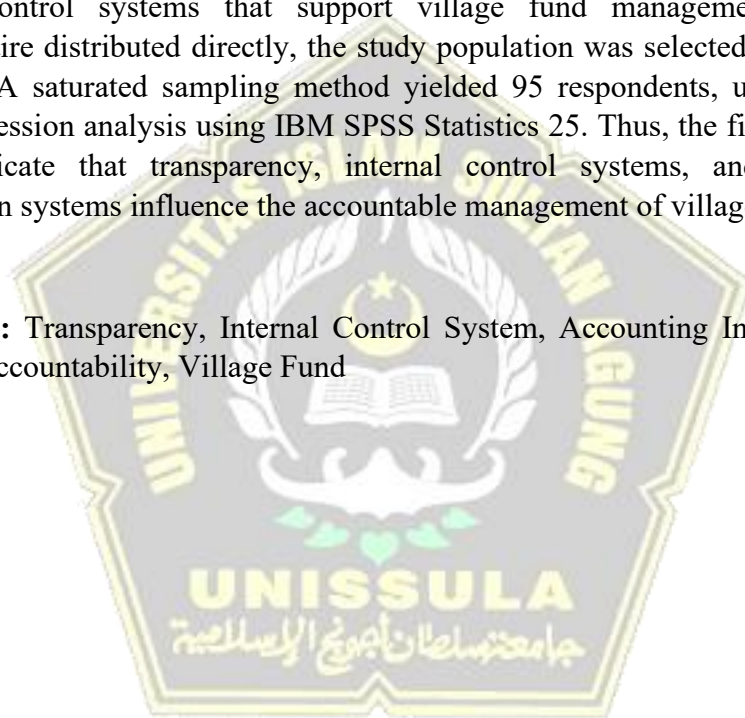


Windarti Widyaningrum

## ABSTRACT

Village funds are budgets allocated to village governments by the central government to manage, develop, and advance their regions. Public sector accountability controls use organizations as a basis for providing explanations to internal and external stakeholders. Proper, appropriate, and transparent management of village funds is essential for the allocation of large funds. The Indonesia Corruption Watch (IWC) states that significant misuse occurs in several sectors, one of the most common being village fund management. Consequently, accountability for those managing village funds is essential. The purpose of this study was to determine how accounting information systems influence village fund management, the extent of openness and transparency in each village, and the internal control systems that support village fund management. Using a questionnaire distributed directly, the study population was selected from Demak Regency. A saturated sampling method yielded 95 respondents, using multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 25. Thus, the findings of this study indicate that transparency, internal control systems, and accounting information systems influence the accountable management of village funds.

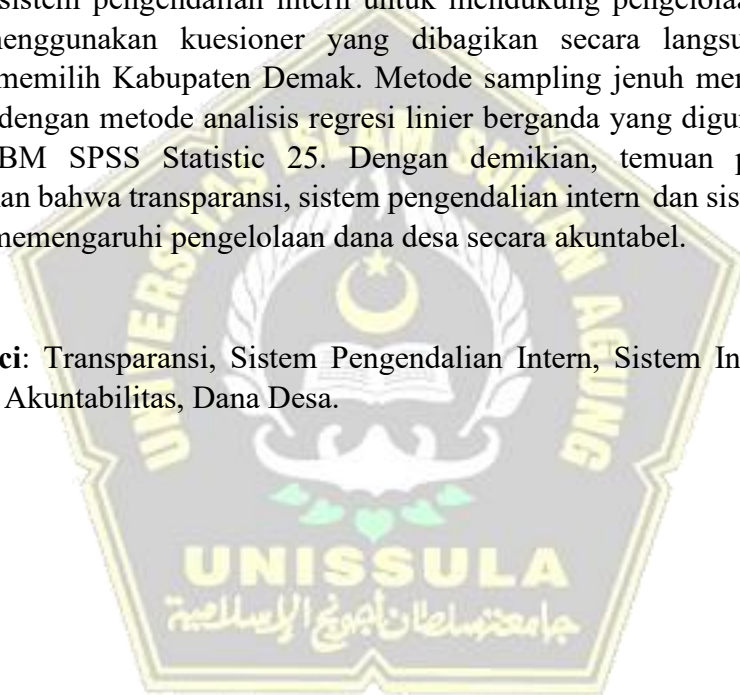
**Keywords:** Transparency, Internal Control System, Accounting Information System, Accountability, Village Fund



## ABSTRAK

Dana desa merupakan anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat untuk mengurus, mengembangkan, dan memajukan daerahnya. Pengendalian akuntabilitas sektor publik menggunakan organisasi sebagai landasan untuk memberikan penjelasan kepada pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan. Pengelolaan dana desa yang baik, tepat, dan transparan diperlukan untuk alokasi dana yang besar. IWC (Indonesia Corruption Watch) menyatakan bahwa ada sejumlah sektor di mana terjadi penyalahgunaan yang signifikan, dan salah satu yang paling umum adalah pengelolaan dana desa. Akibatnya, perlu ada akuntabilitas bagi mereka yang mengelola dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi mempengaruhi pengelolaan dana desa dan seberapa terbuka atau transparan setiap desa serta sistem pengendalian intern untuk mendukung pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung, populasi penelitian memilih Kabupaten Demak. Metode sampling jenuh menghasilkan 95 responden dengan metode analisis regresi linier berganda yang digunakan dengan program IBM SPSS Statistic 25. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi memengaruhi pengelolaan dana desa secara akuntabel.

**Kata Kunci:** Transparansi, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Dana Desa.





## KATA PENGANTAR

Segala syukur bagi ALLAH SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta petunjuk-Nya terutama nikmat pada kesempatan dan kesehatan karenanya penulis mampu menuntaskan penyusunan skripsi dengan semestinya. Kegiatan ini merupakan bagian dari kurikulum Program Studi S1 Akuntansi yang harus penulis jalani sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai Sarjana S1 Akuntansi.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan dukungan arahan dan kesempatan belajar yang diberikan sangat berarti bagi kami dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kami. Karenanya, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga terhadap semua pihak yang terlibat :

1. Bapak Prof Dr. H. Heru Sulistyo, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
2. Bapak Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan motivasi serta semangat untuk penulis.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi dukungan dan dorongan penulis

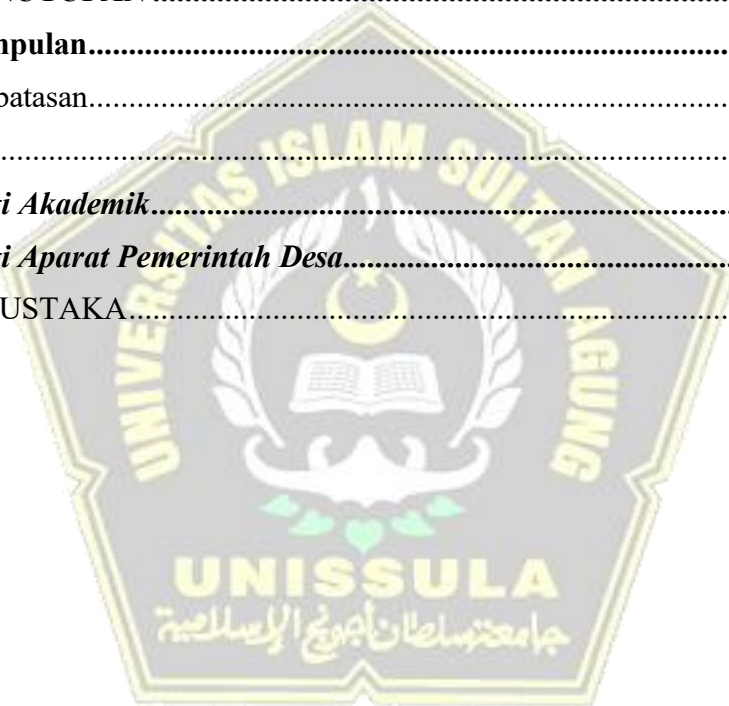
4. Bapak Dedi Rusdi, S.E., M.Si.,Akt.,CA.CRP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta tenaga dengan penuh kesabaran dalam membimbing. Memberikan arahan, kritik, saran dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Terimakasih kepada kedua orang tua saya atas doa, dukungan, dan ketulusan cinta kasih yang telah diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan tanpa menuntut balasan apapun. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan
6. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya, terutama kepada 4 teman terdekat saya. Tanpa kalian, mungkin saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan perjalan kuliah saya tanpa kalian mungkin terasa biasa saja
7. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas semua pencapaian yang telah dilewati. Terimakasih atas proses dan keteguhan hati yang telah membawa sampai sejauh ini. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang sesungguhnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRACT .....	v
<u>ABSTRAK.....</u>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 Pertanyaan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Manfaat Teoritis.....</b>	<b>14</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>14</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
<b>2.2 Variabel Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.2 Transparansi.....</b>	<b>20</b>
<b>2.2.3 Sistem Pengendalian Intern .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.4 Sistem Informasi Akuntansi.....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....</b>	<b>29</b>
<b>2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....</b>	<b>29</b>
<b>2.4.2 Pengembangan Hipotesis.....</b>	<b>30</b>
BAB III METODE PENELITIAN .....	34

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	35
3.2.1 Populasi.....	35
3.2.2 Sampel .....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator .....	39
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	39
3.5.2 Variabel Independen (X).....	39
3.5.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel .....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	42
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	42
3.6.2.2 Uji Reliabilitas.....	43
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	43
2. Uji Multikolonieritas.....	43
3. Uji Heteroskedastitas.....	44
3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	45
3.6.4.2 Analisis Model Regresi.....	45
3.6.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
3.6.4.3. Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	46
3.6.4.4 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t).....	46
BAB VI .....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner .....	48
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel .....	52
4.3 Hasil Uji Kualitas Data .....	57
4.3.1 Hasil Uji Validitas Data .....	57
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	60
4.4.1 Hasil Uji Normalitas .....	60
4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas .....	61
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas.....	62
4.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	63

4.6 Pengujian Hipotesis .....	64
4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
4.6.3 Hasil Uji Parsial (Uji $t$ ).....	66
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
4.7.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 68	
4.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	69
4.7.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	70
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Keterbatasan.....	73
5.3 Saran .....	73
5.3.1 Bagi Akademik.....	73
5.3.2 Bagi Aparat Pemerintah Desa.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teorit .....	30
--	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	4
Tabel 1.2 Data Penyelewengan Kabupaten Demak.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	225
Tabel 3.1 menunjukkan jumlah populasi penelitian, yang mencakup.....	37
Tabel 3.2 Alternatif Jawaban Skala Likert .....	41
Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner .....	50
Tabel 4.2 Data Sample Penelitian .....	51
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4. 4 Karakteristik Usia Responden.....	53
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	53
Tabel 4. 6 Skala Likert.....	54
Tabel 4. 7 Descriptif Statistics .....	55
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Transparansi .....	57
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	58
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi .....	58
Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	59
Tabel 4.12 Uji Validitas Data .....	60
Tabel 4.12 Uji Reabilitas .....	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel 4.14 Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.15 Uji Heteroskedastitas .....	65
Tabel 4. 16 Model Persamaan Regresi.....	65

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan dana desa menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang transparan, didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik, serta sistem informasi akuntansi yang akurat akan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Melinda et al, (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk memulai pembicaraan tentang arti akuntabilitas, kita harus melihat bagaimana akuntabilitas didefinisikan dalam undang-undang Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasil penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan tersebut, nampak bahwa akuntabilitas menjadi suatu hal yang berperan penting dalam mencegah (dan memberantas) tindakan koruptif.

Menurut Babster, E., & Waluyo, B. (2007), akuntabilitas adalah ketika seseorang dapat dipertanggung jawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Akuntabel memiliki tiga makna. Pertama, itu dapat dipertanggung jawabkan, memiliki kemampuan untuk menunjukkan kepada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang mereka lakukan, dan ketiga, itu sesuatu yang dapat dipertimbangkan atau dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas biasanya didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Mustofa, A. (2015). Akuntansi menganggap akuntabilitas sebagai tindakan yang menghasilkan pengungkapan yang tepat. Selain itu, akuntabilitas terkait dengan peran sosial di mana hukum dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari tindakan organisasi, dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, A. 2009)

Untuk memastikan bahwa keuangan desa transparan dan akuntabel, para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, harus memahami cara mengelola dana desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur siklus pengelolaan keuangan desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Setiap tahap pengelolaan memiliki peraturan yang harus dipahami dan diterapkan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Untuk memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan operasi pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Olehsebab itu, akuntabilitas digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan rencana strategik serta tujuan organisasi pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana awal. Dalam sebuah pemerintahan, akuntabilitas menunjukkan bahwa aparatur memiliki kontrol penuh atas semua tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, peran pemerintah merupakan komponen penting dalam memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat atas kinerja pemerintahan. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka diperlukan faktor transparansi, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website [www.Djpb.kemenkeu.go.id](http://www.Djpb.kemenkeu.go.id) Alokasi Dana Desa secara nasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 70 trilyun mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp 68 trilyun. Dengan adanya peningkatan tersebut, demi kelancaran dan kesuksesan penyaluran dana desa tersebut membutuhkan koordinasi dan komitmen pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah dan KPPN selaku penyalur dana desa. Diharapkan bahwa dana yang ditambahkan ke desa tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan dan mendorong potensi ekonomi desa.



Dana desa tersebut yang sudah dianggarkan, masing masing akan disalurkan ke setiap desa. Salah satunya yaitu pada Kabupaten Demak. Adapun dana desa yang dianggarkan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar Rp 255.703.420 dengan rincian alokasi dasar sebesar Rp 164.131.950.000 Alokasi formula sebesar Rp 81.226.114.000 Alokasi afirmasi sebesar Rp 951.192.000 dan Alokasi kinerja sebesar Rp 9.394.164.000 Dana tersebut disalurkan ke masing- masing desa dengan tujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan data rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2023.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa Kabupaten Demak**

Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
Mranggen	13.682.855.000	7.203.944.000		260.949.000	21.147.748.000
Karangawen	8.907.351.000	5.530.695.000			14.438.046.000
Guntur	13.350.645.000	7.329.272.000	211.376.000	260.949.000	21.152.242.000
Sayung	13.911.249.000	8.658.724.000	634.128.000	260.949.000	23.465.050.000
Karangtengah	11.419.682.000	4.930.898.000			16.350.580.000
Wonosalam	14.015.062.000	4.903.461.000		1.304.745.00	20.223.268.000
Dempet	10.506.105.000	4.402.709.000		2.609.490.00	17.518.304.000
Gajah	11.336.623.000	4.202.445.000		521.898.000	16.060.966.000
Karanganyar	11.481.969.000	4.985.994.000			16.467.963.000
Mijen	9.841.687.000	4.202.445.000	105.688.000	521.898.000	14.671.718.000
Demak	9.011.168.000	3.674.096.000		260.949.000	12.946.213.000
Bonang	14.513.379.000	9.884.962.000		521.898.000	24.920.239.000
Wedung	13.226.064.000	8.734.556.000		1.043.796.00	23.004.416.000
Kebonagung	8.928.111.000	2.995.231.000		1.826.643.000	13.749.985.000
Jumlah	164.131.950.000	81.226.114.000	951.192.000	9.394.164.000	255.703.420.000

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Pendapatan daerah pada tahun 2023 melebihi target, mencapai 2,416.786.383.469,83, naik 0,59 persen dari tahun sebelumnya. Pada Rapat Paripurna ke-12 masa sidang kedua, Senin (13/5/2024), Bupati Demak Eisti'anah menyampaikan hal tersebut. Selain itu, Bupati Eisti menyatakan bahwa pengeluaran daerah dikelola secara efektif, dengan total Rp 2.007.574.304.538,00, atau 95,03% dari anggaran. Beliau menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun 2022 dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang signifikan sebesar Rp 124.164.026.490,92.

Akibat dari tingginya dana tersebut mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan harus digunakan sebaik mungkin agar tidak ada kemungkinan kecurangan atau penyelewengan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Adanya perbedaan dana desa lebih anggaran (SiLPA) tersebut dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih kurang, menurut Rismawati (2019). Oleh karena itu, ada komponen penting yang memastikan keberhasilan pengelolaan dana desa. Komponen tersebut meliputi transparansi, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi.

Pada era globalisasi seperti saat ini, transparansi, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Demak sebagai studi kasus merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana desa. Namun, masih terdapat permasalahan terkait akuntabilitas

pengelolaan dana desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa kasus yang dilaporkan oleh berbagai sumber, diantaranya:

**Tabel 1.2 Data Penyelewengan Kabupaten Demak**

Kasus			Tanggal	Sumber
Kepala Desa Kuncir,	Kecamatan Wonosalame, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terlibat dalam kasus korupsi dana desa tahun 2021 dan 2022, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 220 juta.		12 Juli 2023	<i>Kompas.com</i>
Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Kramat Kecamatan Dempet 18/3			27 Maret 2024	<i>Kompasiana.com</i>
Mantan Kepala Desa Surodadi Demak, Kecamatan Sayung, inisial AW ditangkap Satreskrim Polres Demak. AW diduga melakukan korupsi dana desa senilai Rp 747 juta			9 Maret 2023	<i>Radarsemarang.com</i>
Diduga Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, selewengkan hingga Rp 15 miliar dari dana desa, alokasi, dan aspirasi.			3 April 2024	<i>Kompas.com</i>

Dengan mempertimbangkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah akuntabilitas pengelolaan dan desa di Kabupaten Demak masih kurang dan belum memadai. Namun, karena belum terbukti secara empiris, penelitian ini mencoba meneliti dengan populasi aparatur desa yang terdiri dari Organisasi

Perangkat Desa (OPD), termasuk kepala desa, bagian keuangan, kemasyarakatan, dan kesekretariatan.

Menurut Pasal 14 Ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023, peraturan menteri keuangan menetapkan detail tentang pengelolaan dana desa. Peraturan ini menjadi dasar untuk dikeluarkannya PMK NO. 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa. Dana desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diberikan kepada desa untuk mendukung pendanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat.

Dana desa, yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota, digunakan untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diberikan oleh pemerintah kepada desa (Pasal 1 Angka 2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 5 Ayat (1)) dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota sebelum dipindahkan ke APB Desa. (Pasal 6)

Mulai tahun 2015, Undang Undang Desa mulai berlaku. Kebijakan tata kelola desa di dalamnya menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia (Mualifu et al., 2019). Dari tahun 2016 hingga

2020, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 251 Triliun. Untuk setiap desa di Indonesia, dana desa dibagi rata ke seluruh desa. Selanjutnya, dua puluh persen dialokasikan untuk tambahan proporsional kepada setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kesmiskinan, kesulitan geografis, dan luas wilayah. Terakhir, tiga persen dialokasikan untuk desa-desa yang berstatus tinggal.

Dengan alokasi anggaran yang besar ini, ada kekhawatiran tentang kemampuan perangkat desa untuk mengelola dana tersebut dengan cara yang jelas, transparan, tertib, serta akuntabel. Pengelolaan dana desa di beberapa tempat pada kenyataannya masih tidak patuh terhadap transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Selain itu, masih banyak kasus penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dari tahun 2015 hingga 2020, pemerintah desa melakukan 676 korupsi dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 111 miliar. Korupsi dana desa ini berada di urutan kedua setelah kerugian negara (Rahardjo, 2020).

Akibatnya, aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan dalam pengelolaan dana desa, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Konsep ini menjadi sangat penting untuk mengurangi peluang korupsi dan memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal serta pengelolaan dana desa meskipun tidak ada akuntabilitas Julia & Gayatri (2019). Pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa terhadap desa yang terlambat memberikan laporan penggunaan dana desa.



Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa semua orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Ini menjamin bahwa semua orang dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan, serta hasil dari proses tersebut.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019), transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa. Prinsip transparansi adalah membangun kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah dan akurat. Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa secara lebih efektif dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Selain transparansi, sistem pengendalian intern juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Mulyadi (2018), sistem pengendalian intern yang baik dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih tertib dan akuntabel. Dalam lingkungan

perusahaan, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi dan manajemen umum untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut (Rama dan Jones, 2011:132) Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh manajemen, personel, dan dewan direksi entitas. tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian tujuan dengan melindungi kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya secukupnya.

Komponen lainnya yang juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem informasi akuntansi yang juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa bertanggung jawab. Menurut Romney dan Steinbart (2018), sistem informasi akuntansi yang baik dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambil keputusan dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, sistem informasi akuntansi sangat memengaruhi bagaimana pengelolaan dana desa saat ini berjalan. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang baik dapat memengaruhi sistem pengelolaan dana desa yang ada (Fadhil, 2020). Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa topik penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dana desa, diantaranya yaitu Mualifu et al., (2022) yang menyatakan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Namun terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Sistem

Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa sedangkan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (Rismawati, 2019)

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh Muallifu et al., (2022) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa dengan hasil penelitian : bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Adapun persamaan penelitian ini yaitu penerapan dua variabel (X) transparansi dan sistem pengendalian internal dan satu variabel (Y) akuntabilitas. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu yang *pertama*, adanya penambahan variabel sistem informasi akuntansi.

Perbedaan yang *kedua* yaitu pada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa se-Kecamatan Demak. Alasan pemilihan objek penelitian ini karena pada wilayah tersebut masih jarang dilakukan penelitian sehingga cocok untuk dilakukan penelitian pada wilayah tersebut. Serta meningkatnya alokasi dana desa dan fenomena penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menjadi alasan diselenggarakannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa pada masyarakat Kecamatan Demak yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti transparansi, akuntabilitas, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perangkat desa.

Dengan penerapan variabel tersebut pada pengelolaan dana desa tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Kecamatan Demak. Oleh karena itu, penelitian ini diinisiasi untuk menyempurnakan penelitian terdahulu dengan penambahan variabel serta objek dan sampel penelitian yang berbeda. Dari beberapa hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana transparansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi yang baik diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pengawasan publik. Sementara itu, sistem informasi akuntansi yang andal mampu menyediakan data yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Sistem pengendalian intern berfungsi untuk mengurangi risiko penyelewengan. Dengan demikian, penelitian ini menyelidiki seberapa kuat pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Demak.

Referensi dari penelitian terdahulu, seperti studi oleh et al, (2023), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, transparansi berperan penting dalam membangun akuntabilitas publik, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Winda Ningsih, (2021), yang menemukan hubungan positif antara transparansi dan pengelolaan dana desa.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka daftar pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat Desa di Kecamatan Demak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat Desa di Kecamatan Demak



3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat Desa di Kecamatan Demak

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan akademis terkait prinsip-prinsip pengelolaan dana desa, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan serta tanggung jawab pemerintah desa, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2. Manfaat Praktis**

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pemerintah desa mengenai bagaimana sikap dan apa saja yang harus dilakukan agar akuntabilitas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.
- Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan dana desa, terutama tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diharapkan penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis di masa mendatang.
- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama kepada mereka yang bertugas mengelola dana desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Sementara *principal* memberikan mandat atau tanggung jawab kepada agen, agen adalah pihak yang diberikan amanat atau bertanggung jawab atas amanat dan tugas yang diberikan oleh *principal*. Dalam organisasi sektor publik yang dimaksud, masyarakat bertindak sebagai kepala, sedangkan pemerintah bertindak sebagai agen, dalam hal ini kepala desa dan anggota staf desa lainnya. *Principal* berusaha mencari informasi tentang tindakan pemerintah sebagai agen yang berkaitan dengan pengelolaan dana perusahaan dan institusi.

Dalam hal ini, mereka meminta laporan pertanggung jawaban kepada *agent*. Teori agensi menganalisis serta mencari solusi atas masalah yang muncul dalam hubungan antara *principal* dan *agent*. Oleh karena itu, pada dasarnya, inti dari Teori Agensi adalah suatu desain kontrak yang tepat untuk menyelesaikan atau menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan *principal* (Scott, 1997).

Dalam penelitian ini, teori agensi berarti bahwa praktik pengelolaan keuangan desa mencakup pelaporan keuangan desa. Sebagai pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas dana desa, pemerintah desa harus menyajikan laporan keuangan, yang merupakan informasi penting bagi pemilik.

Salah satu bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang dibuat oleh pemerintah desa adalah laporan keuangan yang berkualitas bagi pihak *prinsipal*. Informasi laporan keuangan yang disajikan juga harus memperhatikan prinsip relevansi, transparansi, dan akuntabel.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, aparat pengelola dana desa harus memiliki keahlian yang cukup. Jika pemerintah desa dapat menyajikan laporan keuangan yang baik, laporan tersebut akan dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas serta untuk pengambilan keputusan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan politik Sarah et al., (2020). Dalam hal ini, masyarakat dapat ikut andil dan berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan desa dengan memberikan kritikan dan saran. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan di masa depan.

Selain itu, pemerintah desa harus memiliki kontrol yang baik sebagai bentuk akuntabilitas kepada *prinsipal* agar mereka dapat membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan. Teori ini mengatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mengurangi kecurangan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan dan jenis kecurangan lainnya. Untuk memastikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa terpenuhi dengan baik,

setiap pekerja di suatu organisasi atau instansi harus mematuhi sistem pengendalian internal.

Peranan sistem informasi akuntansi yaitu membantu dalam pengelolaan dana desa serta memudahkan tugas dan tanggung jawab aparat pengelola dana desa sehingga menyajikan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan kepada prinsipal. Sedangkan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa berperan dalam berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sehingga adanya SilPA (selisih dana desa lebih anggaran) dapat digunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, serta berdampak pada peningkatan akuntabilitas itu sendiri.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Istilah "Akuntabilitas" berasal dari kata "Tanggung Jawab" dalam Bahasa Inggris, yang berarti "Pertanggung Jawaban", "Keadaan Untuk Dipertanggung Jawabkan," atau "Keadaan Untuk Diminta Pertanggung Jawaban." Akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen kontrol, terutama dalam hal mencapai hasil pelayanan publik dan memberikan informasi yang jelas kepada publik. Selain itu, akuntabilitas juga dapat berarti bahwa orang-orang atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang berkaitan dengannya harus dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan mereka.

Menurut Darise (2017), akuntabilitas adalah ketika seseorang atau kelompok bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan.

Menurut Supadmi & Suputra (2018), akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa atas pengelolaan dana desa, yang dilakukan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, menurut Kristianto et al. (2018), akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri dari kewajiban untuk melaporkan kepada bupati tentang kinerja dan tindakan kepala desa serta memberikan tanggapan atau penjelasan tentang kinerja tersebut. Prinsipnya adalah bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Kepala desa bertanggung jawab atas kinerjanya kepada bupati dan masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimensi Akuntabilitas Loina Lalolo Krina P., (2003) ada 5 yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktek organisasi yang sehat.
- b. Akuntabilitas manajerial akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggung jawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam 10 pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program
- d. Akuntabilitas kebijakan lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.



- e. Akuntabilitas keuangan mencakup tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara efisien, ekonomis, dan efektif, tanpa pemborosan atau korupsi. Akuntabilitas fiskal ini sangat penting karena sangat penting bagi masyarakat. Akibat situasi ini, lembaga publik harus membuat laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan kepada pihak luar.

### 2.2.2 Transparansi

Kata "Transparansi" berasal dari kata "*Transparent*", yang berarti "Jelas", "Nyata", dan "Terbuka". Dengan demikian, transparansi dapat didefinisikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Konsep ini menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, hasil yang dicapai, dan informasi tentang kebijakan itu sendiri (Loina Lalolo Krina P., 2003).

Transparansi adalah suatu hal yang tidak tersembunyi (bebas, jelas, dan terbuka) bersama dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kerja sama dan kolaborasi. Menurut Sabarno, (2007) “Transparansi Adalah Salah Satu Aspek Mendasar Bagi Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik”. Transparansi menjadi sangat penting untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Pemerintah harus memberikan informasi lengkap tentang apa yang dilakukan karena mereka

memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting yang berdampak pada semua orang. Kebohongan sulit untuk disembunyikan ketika semuanya transparan. Jadi transparansi menjadi alat penting untuk melindungi dana bantuan pemerintah dari korupsi.

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, transparansi adalah prinsip yang memungkinkan setiap orang mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah. Transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, prosedur pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilnya. Manfaat adanya transparansi menurut Nico Andrianto, (2007) antara lain:

1. Mencegah korupsi.
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk menetapkan kebijakan tertentu.
3. Meningkatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat.
4. Lebih mudah untuk menemukan kekuatan dan kelemahan kebijakan.
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

### **2.2.3 Sistem Pengendalian Intern**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sistem pengendalian intern adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern merupakan prosedur penting untuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh staf. Ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tindakan yang dilakukan akan memungkinkan pencapaian tujuan organisasi.

### **2.2.4 Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi adalah suatu proses yang menggabungkan, mengkategorikan, mencatat, dan memproses aktivitas bisnis organisasi ke dalam pelaporan keuangan. Ini adalah bagian dari organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan menyampaikan informasi finansial yang relevan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen dan pihak lainnya. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Wilkinson : sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka penggabungan sumber daya (data, bahan, peralatan, pemasok, staf, dan dana) untuk mengkonversi input berupa data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi keuangan. Ini digunakan untuk menjalankan operasi suatu entitas dan memberikan informasi akuntansi kepada semua pihak yang terlibat.
2. Gelinas, Orams, dan Wiggins menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) adalah subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi tentang transaksi keuangan.
3. Menurut Gelinas, Orams, Dan Wiggins : sistem informasi akuntansi (SIA) adalah subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi tentang transaksi keuangan.
4. Kieso (2005) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Seiring dengan organisasi yang berkembang, sistem informasi menjadi semakin kompleks.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang menggabungkan sumber daya (data, bahan, peralatan, pemasok, staf,

dan dana) untuk mengubah input data ekonomi menjadi keluaran data keuangan. Ini digunakan untuk menjalankan operasi suatu entitas dan memberikan informasi akuntansi kepada semua pihak yang terlibat. Tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi menurut James (2004) dan Marshall Romney Steinbart (2005) adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung dan memudahkan kegiatan operasi sehari-hari, seperti memproses setiap transaksi yang terjadi sehingga penyediaan jasa dan layanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Memberikan informasi dan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang diperlukan untuk membantu proses pengambilan keputusan.
- c. Untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan
- d. Relevansi dan kredibilitas data lebih penting daripada jumlah data yang diperlukan
- e. Meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan.
- f. Menjamin bahwa implementasi sistem dan prosedur dapat dilakukan secara akuntabel, terutama dalam manajemen transaksi keuangan.
- g. Membantu kelancaran proses akuntansi yang memungkinkan agar laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan lebih *auditable*.

- h. Menjamin bahwa ada kontrol dan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil temuan penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh transparansi dalam sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang relevan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
Ratih Amelia Fitri, Fefri Indra Arza (2023)	Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris Pada Nagari Di Kota Pariaman	(X1) Transparansi (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3) Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1) Transparansi tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari secara signifikan. 2) Sistem pengendalian internal tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari secara signifikan. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari tidak terpengaruh secara signifikan oleh kualitas sumber daya manusia.
Arthur	Pengaruh	(X1) Kompetensi	1) Kompetensi



Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
Simanjuntak, Farida Sagala, Selvina Dwi Putri (2023)	Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Aparatur (X2) Partisipasi Masyarakat, (X3) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) Komitmen Organisasi (X5) Transparansi (X6) Sistem Pengendalian Internal (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2) Partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa.</p> <p>3) Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan teknologi informasi.</p> <p>4) Komitmen organisasi pemerintah desa tidak dipengaruhi secara signifikan.</p> <p>5) Transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di desa.</p> <p>6) Akuntabilitas dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian intern.</p>

Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
Winda Ningsih , Eriana Kartadj umena (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Semarang Kabupaten Garut	X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi (X3) Partisipasi (Y) Pengelolaan Dana Desa	1) Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa 2) Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa 3) Partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
Anjelina Yuli Ratnasari, Usman, Andi Yusniar Mendo (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi Kasus Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	(X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Sistem Informasi Akuntansi (X3) Sistem Pengendalian Internal (Y) Kualitas Laporan Keuangan	1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2) Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Cut Melinda Ali, Zulkifli Boki,	Pengaruh Sistem Pengendalian	(X1) Sistem Pengendalian	1) Sistem pengendalian intern

Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
Usman (2023)	Intern Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Intern (X2) Sistem Informasi Akuntansi (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2) Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	(X1) Transparansi (X2) Kompetensi (X3) Sistem Pengendalian Internal (X4) Komitmen Organisasi (Y) Akuntabilitas	1) Transparansi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 2) Kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 4) Komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa

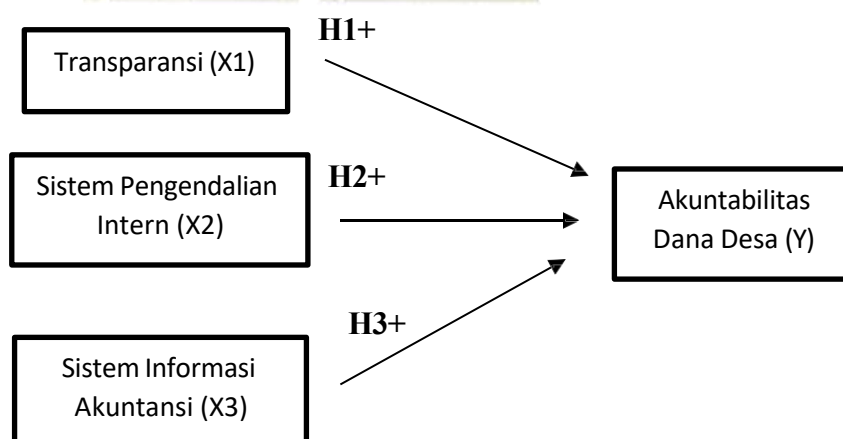
Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
			dalam mengelola alokasi dana desa

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dengan menggunakan landasan teori yang ada dan penelitian teoritis sebelumnya yang telah dilakukan pada penelitian, ini akan menunjukkan bagaimana variabel bekerja sama dalam proses analisisnya. Pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik jika transparansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Karena prinsip-prinsip ini dapat mengurangi kesalahan dan penyelewengan dana desa. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan penerapan transparansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan desa karena ini merupakan komponen penting dari pemerintahan yang baik. Transparansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat. Terutama pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran teoritis dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 2.4.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai solusi sementara yang bersifat sementara atas permasalahan penelitian yang melibatkan pertanyaan ilmiah yang harus diuji. Dengan demikian, karena rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, ada hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis (Saebani, 2013). Adapun hipotesis penelitian ini antara lain:

#### **1. Pengaruh Transparansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi berarti memberikan informasi kepada masyarakat atau publik. Jika masyarakat membutuhkannya, pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi kepada mereka. Untuk meningkatkan pengelolaan dana desa, informasi harus dikomunikasikan secara terbuka dan masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Putra (2017) menyatakan bahwa ketika pemerintah menunjukkan lebih banyak transparansi tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan, lebih mudah untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa dapat diawasi dan dikontrol dengan baik oleh yang berwenang dan menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ini memungkinkan dana desa untuk digunakan untuk pemberdayaan masyarakat secara efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) menyatakan bahwa

transparansi dalam pengelolaan dana desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Winda Ningsih, (2021) bahwa transparansi memiliki dampak yang signifikan terhadap tata desa.

**H1: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

**2. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Karyadi (2019) menjelaskan pengendalian intern sebagai proses yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, kredibilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan hukum yang berlaku. Karena mereka bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan instansi pemerintah dan swasta, manajer harus memiliki kemampuan untuk menilai sistem internal. Perancang sistem juga penting untuk memahami pengendalian internal, karena mereka harus menilai risiko perusahaan tidak dapat mencapai tujuan perusahaan serta menerapkan serta menerapkan pengendalian internal yang dapat menurunkan risiko tersebut.

Penegakan nilai etika, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan mendukung lingkungan pengendalian yang baik. Penilaian risiko mencakup identifikasi risiko; setelah itu, pihak yang bertanggung jawab akan menganalisis risiko untuk mengetahui apakah risiko tersebut berdampak. Proses pengendalian harus dilakukan untuk meminimalkan



risiko yang ada, memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik, dan memastikan bahwa informasi dan komunikasi tersedia untuk menghindari kesalahpahaman antara pemerintah desa dan publik. Untuk memastikan bahwa tujuan instansi tercapai, sistem pengendalian juga harus dipantau. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah telah berjalan dengan baik, yang meningkatkan akuntabilitas dana desa

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan penelitian oleh Indriasih et al. (2022), Dwipayani & Hutnaleontina (2022), dan Arfiansyah (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki efek positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

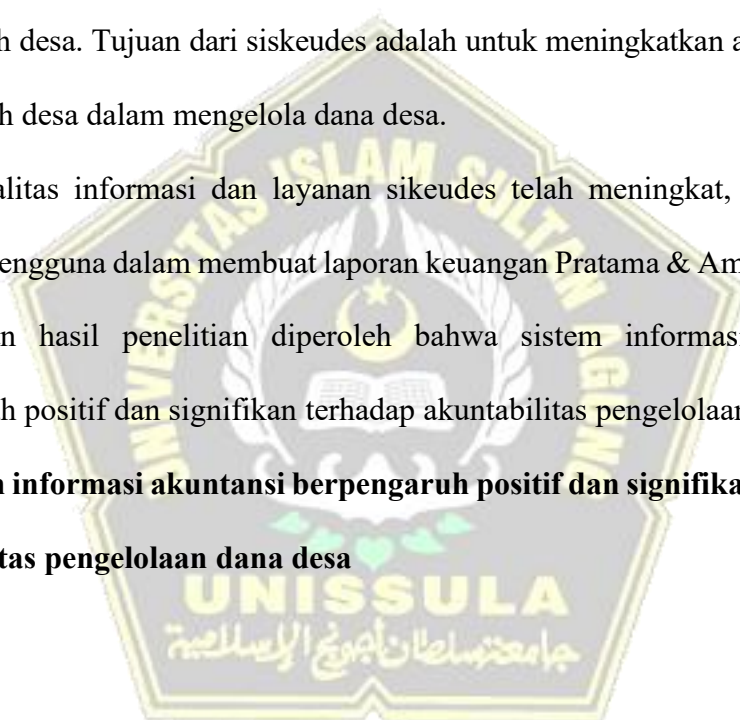
### **3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah desa, yang diakui dalam sistem pemerintahan, adalah kelompok masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan komunitas mereka. Nasional dan berlokasi di daerah kabupaten. Pemerintah desa berfungsi sebagai ujung tombak pemerintahan. Tombak dalam menjalankan pembangunan di semua bidang, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, sosial, dan bantuan yang merupakan pembangunan yang saling bergantung yang meliputi aktivitas masyarakat dan kelangsungannya.

Desa memiliki peran besar dan tanggung jawab besar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam struktur pemerintahannya. Ini berarti bahwa semua hasil penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa secara adil. Siskeudes, atau sistem informasi keuangan desa, dibuat oleh pemerintah pusat selaku principal melalui badan pengawas keuangan dan pembangunan untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan dari siskeudes adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Kualitas informasi dan layanan sikeudes telah meningkat, mendorong kepuasan pengguna dalam membuat laporan keuangan Pratama & Amalia (2019). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**H3: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang disajikan dengan menggunakan angka-angka dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Sedangkan, strategi penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menekankan pada kuantitas daripada kualitas, dan data yang dikumpulkan dari kuesioner dikumpulkan dengan instrumen penelitian yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian yang digunakan. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif atau dapat diukur untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Sugiyono (2015: 14) menyatakan bahwa "metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu." Sedangkan penelitian kuantitatif, menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:39), adalah jenis penelitian yang menghasilkan (menghasilkan) temuan melalui penggunaan teknik kuantifikasi (pengukuran) atau prosedur statistik.

Karena data yang diolah adalah data rasio, peneliti ini menggunakan metode kuantitatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempelajari bagaimana pemerintah Desa di Kecamatan Demak menerapkan prinsip prinsip pengelolaan dana desa yang baik, serta memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Demak dan tantangan yang dihadapi. Didukung dengan data yang dikumpulkan yaitu berupa angka dan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan. Sehingga dari deskripsi data-data yang diperoleh tersebut, dapat digunakan sebagai hasil penelitian.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1 Populasi**

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari, dengan kuantitas dan karakteristik tertentu, dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak sendiri terdiri dari 14 Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Demak yang terdiri dari 19 Desa yang menerima dana dari desa. Berikut populasi dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1 menunjukkan jumlah populasi penelitian, yang mencakup  
19 desa di Kecamatan Demak.**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>
1.	Bango
2.	Bolo
3.	Cabean
4.	Donorejo
5.	Kalikondang
6.	Katonsari
7.	Kedondong
8.	Mulyorejo
9.	Raji
10.	Sedo
11.	Tempuran
12.	Turirejo
13.	Karangmlati
14.	Bintoro
15.	Kadilangu
16.	Kalicilik
17.	Mangunjiwan
18.	Singorejo
19.	Betokan

Sumber : wikipedia.com

Peneliti memilih Desa di Kecamatan Demak sebagai Objek yang akan diteliti karena Kecamatan tersebut belum ada yang melakukan penelitian. Berdasarkan prasarvei dari beberapa web yang dilakukan, dalam web kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, Kecamatan Demak merupakan kecamatan yang transparansi dana belum dipaparkan secara transparan sehingga hal tersebut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 3.2.2 Sampel

Menurut Rismawati (2019), sampel adalah bagian yang diambil dari populasi dan dapat berfungsi sebagai representasi dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh atau sensus, yaitu teknik pengumpulan sampel di mana setiap anggota populasi diambil sebagai sampel, sensus adalah istilah lain untuk sampel jenuh (Sugiyono 2018).

Dengan demikian, sampel pada penelitian ini terdiri dari aparatur atau pejabat dari tim pengelola dana desa Kecamatan Demak. Terdapat 19 desa yang nantinya menjadi populasi sehingga penelitian ini akan memperoleh 95 data yang akan diolah.

Pengujian 95 data perangkat desa yang diperoleh dari 19 desa, dengan kriteria pemilihan sampel yaitu terdiri dari 5 bagian aparatur desa. Diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kaur Keuangan, serta Bagian Kemasyarakatan. Pemilihan sampel tersebut didasarkan terhadap peranan secara langsung didalam pengelolaan dana desa.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu fakta yang memuat informasi mengenai suatu objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Kecamatan Demak. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.



Menurut Rismawati (2019), data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok subjek mengenai variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuesioner yang dibagikan kepada sampel penelitian. Untuk mengukur pengaruh antar variabel penelitian, beberapa daftar pertanyaan akan diajukan kepada responden menggunakan teknik kuesioner skala likert.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey kuesioner. Penelitian ini mengumpulkan data melalui survei lapangan dengan menyebarkan kuesioner ke pemerintah desa Kecamatan Demak. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kuesioner, juga dikenal sebagai angket, adalah metode pengumpulan data di mana seseorang diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Kuesioner yang diberikan dapat berupa sebuah pernyataan yang berkaitan dengan transparansi, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, menurut Sugiyono (2019). Adapun tolok ukur jawaban responden menggunakan skala likert dengan lima tingkat prefensi, dengan masing-masing skor mulai dari satu hingga lima, dengan detail sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Alternatif Jawaban Skala Likert**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

### **3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1 Variabel Dependen (Y)**

Menurut Sugiyono (2019), variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel bebas atau variabel independent disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berarti pemegang amanah, agen, kepala desa, dan aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi amanah (principal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukannya.

#### **3.5.2 Variabel Independen (X)**

Variabel independen merupakan variabel bebas yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen, juga dikenal sebagai variabel X. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari transparansi, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi.

### 3.5.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
<i>Variabel Dependen</i>			
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Menurut (Supadmi & Suputra, 2018), akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa atas pengelolaan dana desa. Pengelolaan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen kontrol, terutama dalam hal mencapai hasil pelayanan publik dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.	Aspek laporan pertanggungjawaban, ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan, kelengkapan dokumen penerimaan dan pengeluaran, serta kemudahan pemahaman informasi keuangan oleh pengguna. (Musfirah et al., 2023)	Likert 1-5
<i>Variabel Independen</i>			
Transparansi	Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung dari orang-orang yang membutuhkannya.	Usaha pemerintah desa dalam memastikan keterbukaan pengelolaan dana desa, publikasi informasi penggunaan dana, ketersediaan laporan tahunan yang dapat diakses masyarakat, keakuratan laporan, dan pembaruan informasi secara rutin. (Gibran et al., 2023)	Likert 1-5



Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal adalah proses yang penting untuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan dengan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut SPIP PP NO. 60 (Indonesia, 2008)	Ketersediaan sistem informasi yang memudahkan pengolahan data, pemahaman pengguna terhadap sistem, dukungan sistem terhadap standar akuntansi, akses data real-time, serta kemampuan sistem dalam mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian. (Wulansari, n.d.)	Likert 1-5
Sistem Informasi Akuntansi	Sistem informasi akuntansi adalah gabungan dari proses akuntansi dan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan perusahaan lebih mudah dan lebih otomatis.	Dokumentasi pengeluaran, pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan kas, audit internal berkala, penyimpanan dokumentasi pengelolaan dana untuk keperluan audit, serta evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal. (Rita Martini et al., 2019.)	Likert 1-5

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun data, menguraikan pola penelitian, meningkatkan makna penelitian, dan menemukan hubungan antar berbagai konsep. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan penggunaan software SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mengetahui apakah propitabilitas variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, teknik analisis data berikut digunakan:

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Heni Risnawati et al (2022), Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan responden penelitian seperti nama, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, jabatan, dan waktu kerja mereka. Uji statistik deskriptif adalah jenis statistika yang menggunakan data sampel atau populasi untuk mendeskripsikan atau menganalisis sesuatu.

#### 3.6.2 Uji Kualitas Data

##### 3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Untuk mengevaluasi validitas instrumen penelitian, menggunakan uji Pearson Correlation yang memiliki tingkat signifikansi 0,05. Nilai  $r$  hitung harus lebih besar dari  $r$  tabel, dan nilai  $r$  hitung harus lebih rendah dari  $r$  tabel. Sebaliknya,



jika nilai  $r$  hitung kurang dari  $r$  tabel, maka instrumen tersebut dianggap tidak valid (Pahlawan et al., 2020)

### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penelitian atau kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sebanding dengan respon persepsi responden (Heni Risnawati et al., 2022). Uji reabilitas penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistik SPSS. Imam (2018) menyatakan bahwa kuesioner dianggap reliabel jika Cronbach alphanya lebih dari 0,06.

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah pengujian data yang dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi variabel residual dalam model regresi normal atau tidak. Model regresi dianggap baik jika distribusi datanya normal atau hampir normal Imam (2013). Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov. Dalam pengambilan keputusan ditetapkan ketentuan:

- Jika nilai signifikan  $> 0,05$  menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.
- Jika nilai signifikan  $< 0,05$  menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal

#### **2. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Jika tidak, model regresi dianggap baik Pahlawan et al., (2020). Dalam penelitian ini menggunakan nilai toleransi dan VIF

(Faktor Inflasi Variasi). Uji multikolonieritas adalah situasi di mana model regresi menemukan korelasi sempurna antara variabel independen (Imam 2018). Nilai toleransi VIF (Faktor Inflasi Variasi) adalah sebagai berikut:

- jika nilai toleransi  $< 0,10$  VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolonieritas
- jika nilai toleransi  $> 0,10$  VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel residual dari satu pengamatan tidak sama dengan pengamatan lainnya (Sarah et al., 2020) Grafik uji scatterplot dapat digunakan untuk mengetahui hasil uji.

Pengujian grafik plot digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Ini dilakukan dengan melihat pertimbangan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dan residu SRESID. Dalam analisis ini, prinsip utamanya adalah bahwa heteroskedastisitas diidentifikasi jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur; sebaliknya, jika titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

Dalam asumsi heteroskedastisitas juga menggunakan uji glejser. Pengujian digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas

- Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , menunjukkan ada heterokedastisitas

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan menguji persamaan variabel secara parsial maupun simultan.

#### 3.6.4.1 Analisis Model Regresi

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menghasilkan nilai variabel dependen dengan menggunakan nilai dari variabel independen yang diketahui (Sugiyono 2018). Studi ini menggunakan tiga alat sebagai analisis regresi berganda untuk mengevaluasi dampak dari tiga variabel bebas dan variabel independen masing-masing. Berikut persamaan untuk analisis regresi linear beganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

**Keterangan :**

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Transparansi

X2 = Sistem Pengendalian Intern

X3 = Sistem Informasi Akuntansi

e = Error term.

#### 3.6.4.2 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yang dapat memberikan penjelasan untuk variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terdapat diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), yang menunjukkan dimana nilai  $R^2$  yang semakin tinggi suatu regresi atau nilainya

mendekati 1, makin baik pula regresi yang dihasilkan (Imam 2018)

#### **3.6.4.3. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)**

Uji Signifikasi Simultan (Uji F) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel anova dari persamaan regresi, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Kriteria yang digunakan untuk melakukan pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan transparansi (Pahlawan et al., 2020).
- $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh transparansi, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi pada saat yang bersamaan (Pahlawan et al., 2020)

#### **3.6.4.4 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t)**

Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t) menentukan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan perilaku variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis

diterima, sedangkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan penolakan hipotesis (Pahlawan et al., 2020)



## BAB VI

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana transparansi, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi berdampak pada pengelolaan dana desa di 19 desa yang terletak di kecamatan Demak Kabupaten Demak. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pemerintahan desa terdiri dari lima bagian: kepala desa, sekretaris, bendahara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bagian kemasyarakatan. Metode sampling jenuh digunakan, melibatkan 95 orang yang secara langsung menerima kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti di lapangan (*Field Survey*).

Distribusi Penyebaran Kuesioner sebagai sample:

**Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner**

No	Nama Desa	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1.	Bango	5	5
2.	Bolo	5	5
3.	Cabean	5	5
4.	Donorejo	5	5
5.	Kalikondang	5	5



6.	Katonsari	5	5
7.	Kedondong	5	5
8.	Mulyorejo	5	5
9.	Raji	5	5
10.	Sedo	5	5
11.	Tempuran	5	5
12.	Turirejo	5	5
13.	Karangmlati	5	5
14.	Bintoro	5	4
15.	Kadilangu	5	4
16.	Kalicilik	5	4
17.	Mangunjiwan	5	5
18.	Singorejo	5	4
19.	Betokan	5	4

*Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2025*

Jumlah data yang diolah dari 95 kuesioner yang disebarkan adalah 90 atau 95%, yang berarti bahwa 90 kuesioner yang telah dikembalikan adalah kuesioner yang sah dan tidak ada kuesioner yang tidak sah. Rincian data dari kuesioner yang telah dikembalikan dapat ditemukan di bawah ini:

**Tabel 4.2 Data Sample Penelitian**

Kuesioner	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebarkan	95	(100%)

Kuesioner yang tidak kembali	5	(5%)
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	90	(95%)

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2025*

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden peneliti ini mengumpulkan data dari berbagai kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan responden.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis_Kelamin		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	Laki Laki	56	62.2	62.2	62.2
	Perempuan	34	37.8	37.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Penelitian ini terdiri dari 62,2 persen responden laki-laki dan 37,8 persen responden perempuan dari 19 desa, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.3. Responden laki-laki mendominasi penelitian, dengan 56 responden laki-laki dan 34 responden perempuan dari total 90 responden.

**Tabel 4. 4 Karakteristik Usia Responden**

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	13	14.4	14.4	14.4
	31-40 Tahun	25	27.8	27.8	42.2
	41-50 Tahun	16	17.8	17.8	60.0
	>50 Tahun	36	40.0	40.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Menurut data yang disajikan dalam tabel 4.4, usia responden tertinggi berada di antara 50 tahun keatas, atau 50% dari total responden. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan perangkat desa adalah orang tua yang produktif, tetapi tingkat produktivitas mereka telah menurun.

**Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat_Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	8	8.9	8.9	8.9

SMA	45	50.0	50.0	58.9
Perguruan Tinggi	37	41.1	41.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kriteria tingkat pendidikan dalam penelitian dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan perguruan tinggi adalah 41,1%, dengan 37 responden, SMA adalah 50%, dengan 45 responden, dan SMP adalah 8,9%, dengan 8 responden. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan paling populer, dengan 45 responden, adalah SMA.

### Analisis Data

#### 4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif penelitian menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi yang diberikan oleh responden terhadap daftar pertanyaan yang disebarluaskan. Nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi yang dihitung menggunakan skala Likert ditunjukkan dalam tanggapan responden.

**Tabel 4. 6 Skala Likert**

Jawaban	Nilai/Skor
STS	Sangat Tidak Setuju 1
TS	Tidak Setuju 2

KS	Kurang Setuju	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

Berdasarkan Sugiyono (2019) maka dapat diperoleh nilai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Sangat rendah : 1,00 – 1,80

Rendah : 1,81 – 2,61

Sedang : 2,62 – 3,42

Tinggi : 3,43 – 4,23

Sangat tinggi : 4,24 – 5,00

Disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Descriptif Statistics**

### Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
TRANSPARANSI	90	20	25	22.28	1.622

SISTEM PENGENDALIAN INTERN	90	20	25	22.11	1.517
SISTEM INFOMASI AKUNTANSI	90	20	25	22.22	1.654
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA	90	16	20	17.80	1.334
Valid N (listwise)	90				

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa total 90 data dari responden telah diolah oleh peneliti. Untuk variabel transparansi, nilai maksimumnya adalah 25 minimum 20 dan standar deviasi 1,622; untuk variabel sistem pengendalian intern, nilai maksimumnya adalah 25, minimum 20 dan standar deviasi 1,517; untuk variabel sistem informasi akuntansi, nilai maksimumnya adalah 25, minimum 20 dan standar deviasi 1,654; dan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, nilai maksimumnya adalah 20, minimum 16 dan standar deviasi 1,334.

### **Deskripsi Variabel Transparansi**

Variabel transparansi dalam penelitian ini diukur dengan 8 indikator. Hasil dari analisa kuesioner dari variabel transparansi dapat disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Transparansi

Statistics					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
<b>Mean</b>	4.46	4.50	4.47	4.44	4.41
<b>Keterangan</b>	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat
	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023*

Dari tabel tersebut, indikator transparansi dapat dikategorikan menjadi 5 kategori: STS, TS, KS, S, dan SS. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis diskriptif, kategori indikator transparansi dapat dikategorikan sangat tinggi. Di mana nilai X1.1 4,46 sangat tinggi, X1.2 4,50 sangat tinggi, X1.3 dengan nilai 4,47 sangat tinggi, X1.4 dengan nilai 4,44 sangat tinggi, X1.5 sangat tinggi dengan nilai 4,41.

**Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern**

Statistics					
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
<b>Mean</b>	4.44	4.52	4.38	4.37	4.40
<b>Keterangan</b>	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat
	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023*

Dari data tersebut, indikator sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat dikategorikan dalam kategori sangat tinggi, dengan rata-rata X2.1 4,44 digolongkan sangat tinggi, X2.2 dengan nilai 4,52 digolongkan sangat tinggi, X2.3 dengan nilai 4,38 digolongkan sangat tinggi, X2.4 4,37 digolongkan sangat tinggi, X2.5 4,40 digolongkan sangat tinggi.

**Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi**

Statistics					
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
<b>Mean</b>	4.47	4.42	4.41	4.48	4.44
<b>Keterangan</b>	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat
	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023*

Dari data tersebut, indikator sistem informasi akuntansi menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat dikategorikan dalam kategori sangat tinggi, dengan rata-rata X3.1 4,47 digolongkan sangat tinggi, X3.2 dengan nilai 4,42 digolongkan sangat tinggi, X3.3 dengan nilai 4,41 digolongkan sangat tinggi, X3.4 4,48 digolongkan sangat tinggi, X3.5 4,44 digolongkan sangat tinggi.

**Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

<b>Statistics</b>				
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
<b>Mean</b>	4.44	4.41	4.49	4.46
<b>Keterangan</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023*

Dari data tersebut, indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat dikategorikan dalam kategori sangat tinggi, dengan rata-rata Y.1 4,44 digolongkan sangat tinggi, Y.2 dengan nilai 4,41 digolongkan sangat tinggi, Y.3 dengan nilai 4,49 digolongkan sangat tinggi, Y.4 4,46 digolongkan sangat tinggi

#### 4.3 Hasil Uji Kualitas Data

##### 4.3.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas penelitian memakai product moment, berdasarkan pada tingkat signifikan kurang dari 0,05 atau  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  (disajikan dalam  $r \text{ produk}$ ) sehingga validitas pertanyaan kuesioner dapat terpenuhi. Sajian tabel:

**Tabel 4.12 Uji Validitas Data**

Variabel		Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X1	Transparansi	1	0,507	0,207	Valid
		2	0,561		Valid
		3	0,625		Valid
		4	0,489		Valid
		5	0,431		Valid
X2	Sistem Pengendalian Intern	1	0,426	0,207	Valid
		2	0,414		Valid
		3	0,618		Valid
		4	0,532		Valid
		5	0,575		Valid
X3	Sistem Informasi Akuntansi	1	0,502	0,207	Valid
		2	0,643		Valid
		3	0,546		Valid
		4	0,486		Valid
		5	0,461		Valid
Y	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1	0,597	0,207	Valid
		2	0,688		Valid
		3	0,767		Valid
		4	0,592		Valid

Berdasarkan tabel 4.14 yang telah disajikan dapat dilihat Uji validitas data dari tiga variabel bebas tersebut (Transparansi, Sistem pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi) dengan variabel terikat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ditunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian adalah valid. Nilai  $r$  pada signifikan 0,05 adalah 0,207 ketika ada  $N$  90.

#### 4.3.1 Hasil Uji Realibilitas

Penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha 0,60. Jika Cronbach Alpha  $> 0,60$  maka dapat dikatakan reliable, dan jika Cronbach Alpha  $< 0,60$  maka dikatakan tidak reliable (Ghozali, 2018). Disajikan tabel hasil uji reliabilitas penelitian:

**Tabel 4.12 Uji Reabilitas**

<b>Item-Total Statistics</b>		
	Cronbach's Alpha	Keterangan
TRANSPARANSI	.802	Valid
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	.799	Valid
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	.810	Valid
AKUNTABILITAS DANA DESA	.844	Valid

Dari tabel di atas, dapat diketahui hasil uji realibilitas untuk masing- masing variabel. Variabel independen transparansi memiliki nilai 0,802, yang menunjukkan bahwa itu dapat dianggap kredibel, dan variabel independen sistem pengendalian intern memiliki nilai 0,799, yang menunjukkan bahwa itu dapat dianggap kredibel. Variabel independen sistem informasi akuntansi memiliki nilai 0,810, yang menunjukkan bahwa itu memenuhi nilai di atas 0,60. Variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai 0,844

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian dengan beberapa uji, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastitas.

##### 4.4.1 Hasil Uji Normalitas

**Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas**

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual			
N		90	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.32214333	
Most Extreme Differences	Absolute	.104	
	Positive	.104	
	Negative	-.086	



Test Statistic	.104
Asymp. Sig. (2-tailed)	.018 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel residu memiliki distribusi normal. Data distribusi normal diberikan jika ada nilai signifikan di atas 0,05 dari hasil Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2018). Dalam data ini, uji normalitas digunakan pada model regresi dengan sample 90, dan nilai tingkat signifikan 0,018 dihasilkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal jika ada nilai signifikan di atas 0,05.

#### 4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah uji untuk mengetahui bagaimana model regresi dapat korelasi yang sempurna antar variabel. Pengujian dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Berikut disajikan tabel uji multikolinieritas:

**Tabel 4.14 Uji Multikolinieritas**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)			

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	-.149	.663	1.508
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	.000	.529	1.889
TRANSPARANSI	.090	.602	1.662

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS DANA DESA

Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel independen sistem pengendalian intern, transparansi, dan sistem informasi akuntansi memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dan bahwa ini dapat digunakan untuk memperkirakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas menentukan apakah ada ketidaksamaan dalam variasi model regresi antara residu. Hasilnya adalah homokedastitas, jika variasi residual pengamatan satu ke yang lain tetap, dan heteroskedastitas, jika variasi tidak tetap. Dalam uji glejser, nilai sig. harus lebih dari 0,05; nilai lebih dari 0,05 menunjukkan tidak adanya heteroskedastitas, dan nilai kurang dari 0,05 menunjukkan adanya heteroskedastitas.

**Tabel 4.15 Uji Heteroskedastitas**

Keterangan		T	Sig.
1	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	-1.137	.259
2	SISTEM PENGENDALIAN INTERN	.002	.999
3	TRANSPARANSI	.655	.514

Berdasarkan sajian tabel diatas dikehui data dari keseluruhan variabel bernilai sig.  $> 0,05$  sehingga hal ini dapat memperlihatkan bahwa regresi penelitian tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastitas. Model regresi dalam penelitian dapat dikatakan layak.

#### 4.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda akan digunakan dengan program SPSS untuk pengelolaan data untuk menjelaskan bagaimana pengaruh independen variabel dan dependent variabel terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kami akan menjelaskan bagaimana transparansi, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 4. 16 Model Persamaan Regresi**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	8.815	2.380	

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	.120	.106	.137
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	.210	.129	.269
TRANSPARANSI	.174	.113	.190

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS DANA DESA

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Dari tabel diatas 4.18 hasil pengelolaan data dalam model regresi linear ialah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 18,815 + 0,174X_1 + 0,210X_2 + 0,120X_3 + e$$

Keterangan :

$X_1$  = Transparansi

$X_2$  = Sistem Pengendalian Intern

$X_3$  = Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan persamaan regresi di atas, nilai konstanta 8,815 menunjukkan bahwa transparansi, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi semuanya konstan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai positif. Nilai koefisien transparansi 0,174 menunjukkan bahwa transparansi bernilai positif dan konstan, dan nilai koefisien sistem pengendalian intern 0,210 menunjukkan bahwa bernilai positif dan konstan, dan nilai koefisien sistem informasi akuntansi 0,120 menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi bernilai positif dan konstan.

#### 4.6 Pengujian Hipotesis

#### 4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam pengukuran model penjelasan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ) antara nol sampai satu. Bila nilai tinggi hingga mendekati satu maka model regresi dapat menjelaskan bahwa semakin kuat variabel independen terhadap variabel dependen.

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 <sup>a</sup>	.642	.639	2.149

a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam tabel yang disajikan, nilai adjusted R-squared 0,639 atau 63,9 persen menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari transparansi, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi dapat menjelaskan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai 63,9 persen, dengan nilai sisa 36,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel penelitian.

#### 4.6.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian F dipergunakan dalam menunjukkan bagaimana semua variabel bebas dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1289.877	3	429.959	80.520	.000 <sup>b</sup>
	Residual	655.578	86	7.623		
	Total	1945.455	89			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS DANA DESA

b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengujian signifikansi Simultan ialah bila nilai Sig. <0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh secara simultan sedangkan jika nilai Sig. >0,05 maka tidak ada pengaruh secara simultan. Pada tabel diatas disajikan nilai Sig. F 80,520 dengan tingkat signifikan 0,000 sehingga dapat diartikan nilai Sig. < 0,05 dan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

#### 4.6.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan guna menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozila,2018).

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		B	Sig.
1	(Constant)	8.815	.098
	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	.120	.004



SISTEM PENGENDALIAN INTERN	.210	.000
TRANSPARANSI	.174	.002

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS DANA DESA

Uji parsial (t) digolongkan berpengaruh jika tingkat signifikannya kurang dari 0,05, dan tidak berpengaruh jika tingkat signifikannya lebih dari 0,05. Berdasarkan data yang disajikan di atas, hipotesis (H1) ialah "diterima", yang berarti bahwa transparansi berdampak secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai sig 0,002 yang kurang dari 0,05 dan koefisien b sebesar 0,174.

Tabel di atas menunjukkan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; tingkat signifikan adalah 0,000 atau  $< 0,05$ , dan koefisien b adalah 0,210. Oleh karena itu, (H2) "diterima", yang berarti sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat dari tabel diatas tingkat signifikan 0,004 atau  $< 0,05$  dan dibuktikan bahwa koefisien b sebesar 0,120 sehingga dapat disimpulkan bahwa (H3) "**diterima**", yaitu Sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang bagaimana transparansi, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, temuan berikut dapat diperoleh:

#### **4.7.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor transparansi berkontribusi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi adalah cara untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Tambuwan (2018) Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima dengan nilai sig 0,002 kurang dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi yang akuntabel dapat dibuat jika ada keterbukaan yang jelas tentang cara pengelolaan dana desa dilaporkan. Penyebaran informasi dari sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan Permendagri no.13, transparansi dana desa dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses semua informasi yang dibuat oleh pemerintah untuk peningkatan dan pengelolaan dana desa.

Tersedianya layanan secara online melalui webset resmi menampilkan banyak laporan penyelenggaraan selama tahun berjalan sesuai dengan usulan pemerintah untuk pembangunan desa. Laporan tidak hanya tersedia secara online, Selain itu, masyarakat dapat diinformasikan melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa. Sudah pasti, memberikan akses yang mudah diakses pemerintah akan membuat pemerintah lebih transparan. Adanya transparansi yang jelas, tanpa ada yang disembunyikan, memungkinkan pembentukan struktur pertahanan yang efektif. yang pastinya akan meningkatkan good governance, dimana ketika

pemerintah menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola dana desa dengan baik dan masyarakat atau partisipan mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sukmawati, 2019 menunjukkan adanya dampak signifikan transparansi terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windyastuti, 2019. Sementara itu, menurut Lawdewi, 2020, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

#### **4.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan analisis regresi linear berganda yang dilakukan melalui uji t, ditemukan bahwa nilai signifikan t berada di atas ttabel. Hasil menunjukkan bahwa H2 diterima dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena sistem pengendalian internal yang digunakan dalam suatu lembaga atau organisasi dapat meningkatkan kualitas keamanan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang cukup tentang tercapainya tujuan organisasi atau lembaga

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Agensi, yang menjelaskan sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam lembaga pemerintah untuk

mengawasi, mengarahkan, serta menilai sumber daya yang tersedia di lembaga tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan pemerintahan, khususnya pada tingkat desa, dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan tepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dihasilkan oleh Aziiz (2019) dan Rismawati (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

#### **4.7.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor akuntabilitas yang berkaitan dengan manajemen dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh sistem informasi akuntansi. Hasil menunjukkan penerimaan H3 dengan nilai sig 0,004 di bawah 0,05. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemberi amanah sebagai prinsipal dan pelaksana sebagai agen. Dalam konteks penerapan teori agensi, masyarakat desa berperan sebagai prinsipal yang mempercayakan tugas kepada pemerintah desa sebagai agen. Untuk mengelola keuangan desa dengan baik, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang efektif agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara akuntabel.

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti Fadhil (2020), yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan dana desa selalu tersedia dan tepat waktu.. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian Zeny et al. (2020), yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berkontribusi pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.



## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung tentang bagaimana transparansi, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. dengan metode analisis SPSS, yang melibatkan 95 sampel aparat desa yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi memberikan dampak positif yang signifikan pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan, yang juga disebut transparansi, adalah elemen penting yang mendasari penyampaian informasi secara jujur dan menghindari potensi penyelewengan. Ketika tingkat transparansi dalam penyampaian informasi keuangan desa semakin tinggi, maka laporan yang disediakan akan semakin dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penggunaan teknologi informasi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi memiliki fungsi yang sangat krusial dalam mendukung peningkatan kinerja aparat desa. Namun, sebaliknya, jika pemanfaatan teknologi informasi belum optimal, hal ini dapat menghalangi proses pengelolaan dan pelaporan di tingkat desa. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.



c. Sistem informasi akuntansi secara individual memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam teori agensi, masyarakat desa sebagai pemilik memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa, yang bertindak sebagai agen. Agar keuangan desa dikelola secara akuntabel, sistem informasi akuntansi yang berfungsi dengan baik diperlukan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

## **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam metode penelitian saat ini yaitu peneliti mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang mereka katakan saat melakukan penelitian. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner masih diperlukan untuk memberi penjelasan mendalam kepada responden tentang tujuan dari pernyataan penelitian, yang menyebabkan waktu yang lebih lama. Ketakutan empat desa terhadap masalah di media juga menyulitkan peneliti dalam memilih responden.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran berikut ini:

### **5.3.1 Bagi Akademik**

Hasil penelitian dengan Adj. R-Square menunjukkan bahwa 86% dari penelitian memiliki nilai kategori tinggi, sehingga masih ada 14% variabel yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti di masa depan diharapkan dapat melakukan penelitian di berbagai tempat untuk menambah referensi ilmu. Diharapkan bahwa peneliti keberlanjutan dapat menggunakan berbagai teknik pengambilan data untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian yang ada di lapangan, baik dari segi pernyataan maupun kenyataan.

### **5.3.2 Bagi Aparat Pemerintah Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemetintah desa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik. Diharapkan bahwa informasi yang dikumpulkan akan memberikan perspektif atau cara

berpikir yang berbeda yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan keterampilan yang diperkaya, aparat desa pasti akan lebih mahir dalam menyediakan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan menggunakan kemajuan teknologi. Diharapkan pemerintah akan memberikan lebih banyak pelatihan untuk membantu aparat desa menjadi lebih akuntabel dalam pelaporan keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Egovernment*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Arfiansyah, Mufti Arief. 2020. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Jifa (Journal Of Islamic Finance And Accounting)* 3(1).
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/Um004v6i22019p334>
- Bpk. 2010. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintah (Sap).” <http://www.dikti.go.id/files/atur/pp17-2010lengkap.pdf>.
- Cut Melinda Ali, Zulkifli Boku, U., & Boku, Z. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 1(4), 259–273.
- Darise Dalam Afrilanti. (2017). *Akuntabilitas Adalah Kewajiban Seseorang Atau Satuan Kerja Untuk Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Dan Pengendalian Sumber Daya Dan Kebijakan*.
- Heni Risnawati, Sukma Wijayanti, & , Sri Retnoningsih. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 199–211. <https://doi.org/10.37339/E-Bis.V6i1.838>
- Imam, Ghazali. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS.” *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*: 98–99.
- Indonesia, P. P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, 69–73. [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/Files/Bst/Publikationen/Grauepublikationen/Mt\\_Glob alization\\_Report\\_2018.Pdf%0ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_Glob alisation, Society And Inequalities\(Lsero\).Pdf%0ahttps://www.quora.com/What-Is-The](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/Files/Bst/Publikationen/Grauepublikationen/Mt_Glob alization_Report_2018.Pdf%0ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_Glob alisation, Society And Inequalities(Lsero).Pdf%0ahttps://www.quora.com/What-Is-The)

- Karyadi. (2019). *Pengendalian Internal Adalah Proses Yang Dirancang Untuk Menjamin Tercapainya Tujuan Perusahaan. Tujuan Tersebut Meliputi Efektivitas Dan Efisiensi Operasi, Keandalan Laporan Keuangan, Dan Kepatuhan Hukum.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). “Data Alokasi Dana Desa” (2023). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. 3(1), 10.
- Kompas.Com. (2023). *Kades Di Demak Korupsi Dana Desa Rp 220 Juta*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/07/12/182800378/Kades-Di-Demak-Korupsi-Dana-Desa-Rp-220-Juta-Ternyata-Pernah-Ditahan-Kasus?Page=All>
- Kompasiana.Com. (2022). *Kasus Dugaan Penyelewangan Dana Desa Di Desa Kramat Kecamatan Dempet*. <https://www.kompasiana.com/kresnacybercell2725/6603808dc57afb282d729752/Bpd-Desa-Kramat-Dempet-Resmi-Adukan-Kades-Atas-Dugaan-Penyalahgunaan-Dana-Desa-Ke-Kejari-Demak>
- Loina Lalolo Krina P. (2003). *Transparansi*. 2588–2593.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal Of Economic, Business And Engineering*, 1(1), 49–59.
- Nico Andrianto. (2007). *Manfaat Adanya Transparansi Menurut (Nico Andrianto, 2007) Antara Lain \_ - Penelusuran Google.*
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Radarsemarang.Com. (2021). *Korupsi Dana Desa Rp 747 Juta, Mantan Kades Surodadi Demak Ditangkap*. <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/721406813/korupsi-dana-desar-p-747-juta-mantan-kades-surodadi-demak-ditangkap>
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

- Sabarno, H. (2007). *Hari Sabarno "Transparansi Adalah Salah Satu Aspek Mendasar Bagi Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik"* (P. 38).
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Supadmi, N. ., & Suputra, D. . D. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar*. 13(2), 132–145.
- Suparyanto. 2020. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Suparyanto* 5(3): 248–53.
- Sweetenia, Amanda Mutiara, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, And Anissa Hakim Purwantini. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17(1): 44–56.
- Tambuwun. 2018. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1): 76–84.
- Widyatama. 2017. "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( Add )." 02(02): 1–20.
- Wikipedia.Com. (2023). Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Demak. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Kecamatan\\_Dan\\_Kelurahan\\_Di\\_Kabupaten\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_Dan_Kelurahan_Di_Kabupaten_Demak)
- Winda Ningsih, E. K. Umena. (2021). (2021). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2): 123–135. 32(32), 1–203.
- Windyastuti, Lita Yulita Fitriyani, Marita, And Mufida Nur Afifah. 2019. "Accountability And Transparency In Managing Village Funds In Ngawen , Blora, Central Java." *Proceeding Uii-Icabe*: 177–84.
- Yulianti. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola 81 Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)." *Jurnal Ekonomi* 27(4): 386–98